



MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

A photograph of a hand holding blue chopsticks over a white bowl filled with food. The bowl has a colorful floral pattern. The background is a textured, light-colored wall.

MANDIRI DENGAN UMi

Peran UMKM sebagai penopang perekonomian nasional tak bisa dipandang sebelah mata. UMi hadir menawarkan fasilitas pembiayaan bagi pelaku usaha mikro yang tak terjangkau fasilitas kredit perbankan. Harapannya, kemandirian dan peningkatan ekonomi keluarga prasejahtera dapat tercapai.

Daftar Isi



COVER STORY:

Dukungan pemerintah untuk meningkatkan geliat UMKM terus dilakukan. Program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) diluncurkan sejak tahun 2017 khusus tertuju bagi pelaku UMKM yang tidak *bankable*. Gambar mie ayam dari penjual gerobak merepresentasikan para pelaku usaha mikro yang dapat mengakses UMi.

MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play



Foto Cover:

Anas Nur Huda

5 DARI LAPANGAN BANTENG

6 EKSPOSUR

LAPORAN UTAMA

- 8 Maslahat UMi Bagi Petani
- 12 Rantai Program Bertaut, Dana UMi Bersambut
- 16 Infografis
- 18 Meniti Mimpi Bersama UMi
- 20 Peduli Pada yang Papa

PHOTO STORY

- 22 Kreasi Lain Kain Pantai

TEKA TEKI

- 22 Teka Teki Medkeu

WAWANCARA

- 25 Regenerasi Kunci Angkat Prestasi

POTRET KANTOR

- 28 Teladan Perubahan dari Timur

BAGAIMANA CARANYA?

- 31 Langkah Mudah Laporkan Pelanggaran

FIGUR

- 32 Keikhlasan Melakonian Beragam Peran

BUKU

- 35 Kejutannya Sampai di Kalimat Terakhir

OPINI

- 36 Peran Anggaran Dan Koordinasi Antar Lembaga Dalam

UANG KITA BUAT APA

- 38 Tol Dumai Ekonomi Damai
- OPINI
- 46 Menjadi Calon Sosialita, Memakmurkan Indonesia

GENERASI EMAS

- 48 Lestari Berkat Difusi Inovasi

LOKAL

- 54 Surga Wisata Belanja

FINANSIAL

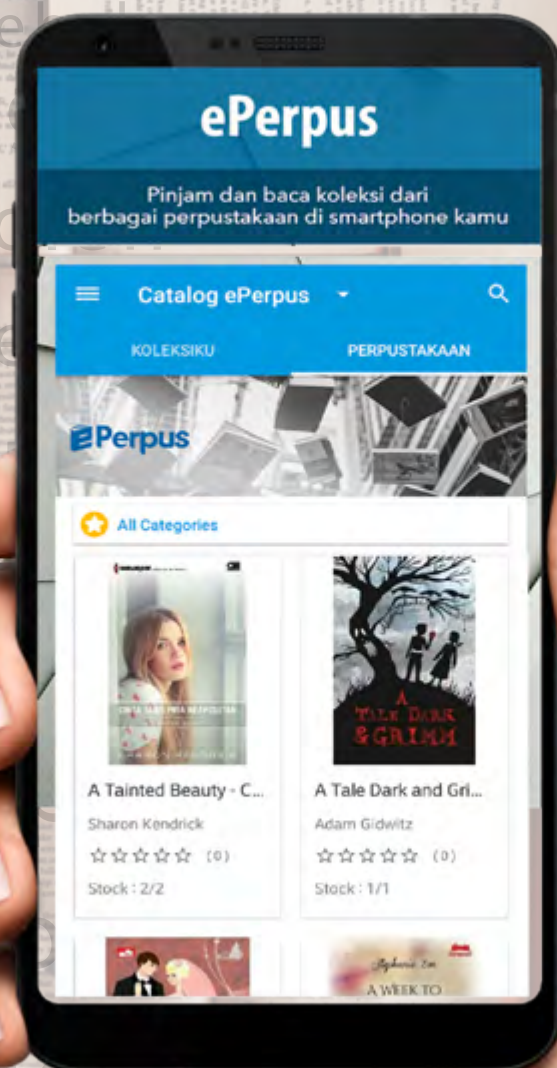
- 56 Dana Darurat Saat Pandemi

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

ePerpus aja!

Dapatkan segera

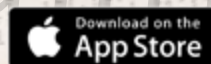
email ke: perpustakaan@kemenkeu.go.id



✓ **Koran**

✓ **Majalah**

✓ **Novel**



Memperkokukuh Lapisan Usaha Terbawah

April adalah bulan istimewa bagi perempuan Indonesia. Hari kelahiran Kartini, sang pejuang kesetaraan hak-hak perempuan, diperingati setiap tahunnya di bulan ini. Dari dulu hingga kini, daya juang kaum hawa Indonesia terbukti luar biasa. Jutaan Kartini tampil kembali memperjuangkan hal berbeda, di tiap bidang pekerjaan, di tiap lapisan ekonomi. Di sektor usaha mikro lapisan terbawah, mereka juga jamak ditemukan. Dengan segala keterbatasan modal, aset, dan omzet, mereka membuka usaha guna memperoleh tambahan pemasukan bagi keluarga.

Karena segala keterbatasannya, mereka seringkali dinilai tidak layak memperoleh pinjaman dari lembaga pembiayaan formal. Untuk membantu mereka, sejumlah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) mengadopsi skema pembiayaan untuk pelaku usaha mikro yang disalurkan secara berkelompok kepada perempuan prasejahtera.

Lantaran target LKBB tersebut

selaras dengan sasaran pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Kementerian Keuangan melalui Pusat Investasi Pemerintah menjalin kerjasama dengan mereka supaya dapat menjangkau pelaku usaha mikro yang berasal dari kalangan masyarakat prasejahtera. Itulah sebabnya mengapa debitur pembiayaan UMi didominasi oleh perempuan. Angkanya bahkan mencapai 90-an persen dari total debitur.

Namun, sesungguhnya program pembiayaan UMi tidaklah khusus tertuju bagi perempuan Indonesia saja. UMi bertujuan memberikan fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha kecil yang tak dapat terjangkau oleh fasilitas kredit perbankan. Hal ini sejalan dengan tujuan Nawacita pemerintah, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Tak hanya itu, UMi juga berusaha menysasar para debitur di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) agar tujuan pemerataan pembangunan dapat tercapai, sekaligus menurunkan indeks *gini ratio* atau tingkat ketimpangan

pendapatan secara menyeluruh.

Selain itu, ekonomi nasional diprediksi akan mengalami penurunan akibat wabah Covid-19. Oleh karenanya, dukungan terhadap UMKM perlu terus ditingkatkan. UMKM memang terbukti menjadi penopang perekonomian Indonesia. Bahkan ketika krisis ekonomi 1998 mendera, merekalah sang penyelamat ekonomi nasional. Dengan dukungan pemerintah, mereka akan semakin kukuh.

Sama sederhananya dengan kutipan sajak milik Joko Pinurbo, "Setelah punya rumah, apa cita-citamu? Kecil saja: ingin sampai rumah saat senja, supaya saya dan senja sempat minum teh bersama di depan jendela", pemerintah pun punya cita-cita: makin banyak debitur UMi bisa naik kelas sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan keluarga. Selamat membaca!

Rahmat Widiana,
Pemimpin Redaksi
Media Keuangan



Majalah Media Keuangan
[@majalahmediakeuangan](https://www.instagram.com/majalahmediakeuangan)

Menurut kamu, dari tiga fasilitas UMi di bawah ini, mana yang harus ditingkatkan?

1. Pembiayaan/pinjaman
2. Pendampingan usaha
3. Pemerataan daerah akses pembiayaan

@jingga0102

Pembiayaan/Pinjaman. Karena meski sudah pegang modal, banyak juga pengusaha kecil yang perlu dibantu untuk pengelolaan modal bisnisnya, literasi keuangannya kurang, dan perlu edukasi marketing. Yang dibutuhkan ga semata mata modal doang

@arifin_samsul

Pendampingan Usaha. Syarat ideal agar unit usaha kecil bisa naik kelas adalah dengan memberikan pendampingan. Dalam pendampingan ini, pemerintah juga dapat meningkatkan literasi keuangan mereka

@syanaada

Pemerataan daerah akses pembiayaan perlu segera dilaksanakan agar akselerasi pengentasan kemiskinan dapat terjadi. Masyarakat Indonesia yang berada pada garis kemiskinan bukan hanya ada di pulau Jawa tapi juga sampai ke Indonesia bagian timur.



Segera lapor, Jangan molor

MENTERI KEUANGAN Sri Mulyani bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak secara online melalui e-filing di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Selasa (10/3). Menteri Keuangan berharap, tindakan tersebut bisa menjadi teladan bagi masyarakat, terutama wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Foto
Irfan Bayu P.

Teks
Anas Nur Huda

Maslahat UMi Bagi Petani

Mentari belum beranjak dari peraduannya namun Sudarno sudah keluar rumah dan berjalan dengan langkah mantap menuju area sawah padi miliknya. Ia menjinjing cangkul di tangan kanannya dan tak lupa mengenakan caping agar terlindungi dari terik matahari siang nanti.

Bukan baru setahun dua tahun, ia menjalani rutinitas ini sudah sedari dini. Sawah padi ini diwariskan turun temurun dan saat ini Sudarno adalah pelanjut tongkat estafetnya. Profesi warisan ini tak dianggapnya sebagai beban, itu terlihat dari wajahnya yang penuh senyuman.

Sudarno adalah satu dari 5.100 anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mintorogo yang mendapatkan alokasi dana dari pembiayaan ultra mikro (UMi) dari Kementerian Keuangan. Ia mendapatkan Pembiayaan UMi sejak November 2018.

KSP Mintorogo tempat Sudarno menjadi anggota mendapat pembiayaan dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) melalui PT Bahana Artha Ventura (BAV), salah satu Lembaga

Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang membantu menyalurkan pembiayaan UMi.

“Awalnya kami mendapat informasi dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah bahwa ada pembiayaan yang dikhususkan untuk ultra mikro. Kami lalu mencoba untuk mengajukan proposal dan memperoleh persetujuan. Kami pun kemudian diberikan pembiayaan sebesar Rp10 miliar,” ujar Apriliya Ikayanti, Manajer Divisi Operasional KSP KUD Mintorogo.

Program pembiayaan UMi sangat bermanfaat bagi masyarakat pertanian dalam mencukupi produksi usahanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para petani.

Foto
Resha Aditya

”

“Sekarang ini saya panen setiap empat bulan sekali. Tiap panen hasilnya enam ton gabah. Alhamdulillah karena fasilitas di Mintorogo ini bunganya rendah jadi hasilnya lumayan untuk bisa dinikmati bersama keluarga. Jadi bisa mencukupi juga untuk kebutuhan sehari-hari,”

Sudarno
Petani KSP KUD Mintorogo

Jawaban atas kendala permodalan petani

Kepala Seksi Fasilitas Pembiayaan, Direktorat Pembiayaan Pertanian, Kementerian Pertanian, Siswoyo mengatakan program pembiayaan UMi ini sangat bermanfaat untuk masyarakat pertanian. Petani mendapat modal yang mencukupi untuk produksi usahanya yang berefek positif terhadap peningkatan kesejahteraan hidup petani.

“Masyarakat petani itu kendala utamanya adalah aspek permodalan. Namun demikian, petani selama ini dianggap tidak bankable dan tidak fisibel sehingga untuk pinjam ke bank relatif sulit. Nah, dengan adanya UMi ini petani jadi memiliki modal yang mencukupi. Otomatis usaha taninya akan lancar dan bisa berproduksi sehingga kesejahteraannya bisa terpenuhi,” ujar Siswoyo.

Dari KSP Mintorogo, Sudarno mendapatkan pembiayaan UMi sebesar Rp9 juta. Ia menggunakan dana UMi untuk membeli kebutuhan tani seperti pupuk dan membayar tenaga untuk menggarap sawahnya. Setelah menjadi debitur UMi, hasilnya produksi padinya lebih meningkat dari sebelumnya.

“Sekarang ini saya panen setiap empat bulan sekali. Tiap panen hasilnya enam ton gabah. Alhamdulillah karena fasilitas di Mintorogo ini bunganya rendah jadi hasilnya lumayan untuk bisa dinikmati bersama keluarga. Jadi bisa mencukupi juga untuk kebutuhan sehari-hari,” tuturnya.

KSP Mintorogo tidak menasar target segmen usaha tertentu. Namun dikarenakan wilayah Jawa Tengah bagian utara mayoritas adalah masyarakat pertanian maka 36 persen debitur UMi di KSP Mintorogo berasal dari kalangan petani yang kesulitan mendapat akses pinjaman perbankan.

“Kami tidak mengkhususkan segmen usaha tertentu. Memang sebagian besar ada di pertanian karena wilayah Jawa Tengah bagian utara itu kebanyakan

petani, baik padi, beras, bawang merah dan palawija. Kalau kita bicara UMi, kebanyakan debiturnya *nonbankable*. Rata-rata mereka tidak memiliki agunan dan beberapa izin yang dibutuhkan seperti yang diinginkan oleh perbankan,” tutur April.

”

“Masyarakat petani itu kendala utamanya adalah aspek permodalan. Namun demikian, petani selama ini dianggap tidak bankable dan tidak fisibel sehingga untuk pinjam ke bank relatif sulit. Nah, dengan adanya UMi ini petani jadi memiliki modal yang mencukupi. Otomatis usaha taninya akan lancar dan bisa berproduksi sehingga kesejahteraannya bisa terpenuhi,”

Siswoyo
Kepala Seksi Fasilitas
Pembiayaan, Kementerian
Pertanian

Solusi petani hindari jeratan tengkulak

Sudarno merasa amat terbantu dengan adanya pembiayaan UMi. Besaran bunga yang hanya dua persen membuat beban usahanya menjadi lebih ringan. Jauh sebelum pembiayaan UMi hadir, petani dari Desa Wonorejo, Karanganyar tersebut sempat merasakan sulitnya mendapatkan hasil yang optimal dari sawah miliknya.

“Dulu itu modelnya bukan pinjam tapi hasil panen kita itu di sistem ijon oleh tengkulak jadi harganya murah. Jadi kita ya hasilnya sangat minim. Istilahnya, kita mendapatkan hasil nggak terlalu banyak karena harga sudah dipatok. Kalau mau dibayar sekian, kalau nggak mau ya sudah. Lha, saya perlu uang untuk biaya garap sawah dan kebutuhan sehari-hari. Mau nggak mau jual ke tengkulak dengan sistem ijon itu,” kenang Sudarno.

Menurut Siswoyo, program pembiayaan UMi ini sangat membantu petani sehingga tidak lagi meminjam pada pelepas uang (rentenir)

“Selama ini, petani butuh dana dia akan lari ke pelepas uang. Soalnya lagi butuh, misalnya untuk beli benih, tapi enggak ada uang. Mereka pinjam Rp 1 juta bisa mengembalikan Rp 1,5 juta. Tetapi dengan adanya LKMA yang mendapatkan dari UMi, bisa langsung pinjam ke sini (UMi) saja”

Mendorong literasi keuangan

Pembiayaan UMi tidak hanya sekedar memberikan pinjaman kepada debitur. Lebih dari itu, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA), koperasi dan debitur juga mendapatkan program pelatihan.

“Salah satu manfaat UMi adalah LKMA selain mendapatkan pembiayaan UMi, mereka juga memperoleh pelatihan manajemen risiko. Mereka diajarkan cara untuk mengelola keuangan sebab LKMA nantinya akan menyalurkan dana yang didapat ke masing-masing anggota petani. Selain itu, LKMA juga diajarkan membuat laporan secara daring selama enam hari. Jadi, siapa saja debitur UMi di LKMA tersebut datanya akan muncul dan dapat langsung diakses juga oleh PIP,” ujar Siswoyo.

Hal senada juga diungkapkan oleh April. Selain pembiayaan dalam bentuk modal, kerja sama antara KSP Mintorogo dan PIP juga berupa pelatihan yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi koperasi atas pelayanan terhadap anggota.



“Pihak koperasi pun memberikan pendampingan kepada para anggota melalui tiga cara. Pertama, pendampingan wajib yaitu pendamping melakukan kunjungan dalam konteks ketertiban pembayaran angsurannya. Kedua, pendampingan tambahan untuk memberikan masukan terhadap kondisi usaha. Kami memberikan beberapa pengetahuan usaha salah satunya adalah cara mengurus izin usaha mikro. Ketiga, kerja sama dengan instansi di masing-masing kabupaten terutama Dinas Koperasi,” jelasnya.

Plafon, bunga dan pencairan menjadi perhatian

Ketika ditanya mengenai apa harapannya terhadap pembiayaan UMi, Sudarno berharap agar plafon pinjaman bisa dinaikkan lebih dari Rp10 juta. Selain itu, ia juga mengharapkan bunga yang lebih ringan dan pencairan yang lebih cepat.

“Saya berencana menyewa sawah saudara untuk saya garap sendiri tapi biayanya kurang kalau pinjamannya maksimal Rp10 juta. Jadi kalau bisa dari atas ya bisa membuat aturan yang lebih

baik, yaitu ditambah jadi Rp 15–20 juta. Selain itu, kalo bisa bunganya bisa lebih rendah lagi dan juga untuk pencairan kalau bisa setelah saya lunasi bisa lah satu hari langsung dikasih cair lagi. Kalo sekarang ini kata petugasnya kok ini tunggu ke sistem dulu jadi dua hari baru cair. Jadinya saya bolak-balik ke KSP Mintorogo,” harapnya.

Plafon yang maksimal hanya Rp10 juta juga menjadi perhatian KSP Mintorogo. April mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi dari Oktober 2018 hingga Desember 2019. Kesimpulannya adalah bahwa dengan nominal Rp10 juta belum terlalu berdampak signifikan bagi perkembangan usaha para debitur UMi.

“Kami ambil sampel 20 debitur dengan plafon tertinggi yakni Rp10 juta, Rp7 juta, dan Rp5 juta. Dari indikator yang ditetapkan seperti rumah dan volume usaha, tidak terlalu signifikan peningkatannya. Usahanya masih jalan dan ada sedikit penambahan namun dari tingkat ekonomi mereka belum ada perubahan yang berarti,” jelasnya.

Dari hasil evaluasi ini, KSP Mintorogo pun memberikan usulan agar plafon

dinaikkan antara rentang Rp10 juta hingga Rp25 juta.

“KUR itu kan Rp25 juta sampai Rp500 juta, UMi maksimal Rp 10 juta. Nah di angka Rp10 sampai Rp25 juta belum ada yang menggarap kan. Makanya kenapa nggak sekalian saja UMi plafonnya sampai kurang dari Rp25 juta? Supaya plafon bisa dimanfaatkan secara optimal dan pertumbuhannya juga dapat terlihat,” tuturnya.

Harapan serupa juga disampaikan oleh Siswoyo. Soal waktu pencairan dan bunga juga menjadi fokusnya untuk perbaikan bagi pembiayaan UMi ke depannya.

“Mulai dari administrasi, dari pengajuan sampai cair paling nggak maksimal satu bulan saja. Kemarin itu sampai enam bulan. Nah, itu yang perlu dievaluasi. Untuk bunga juga dapat diturunkan lagi agar terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, untuk pelaporan sebaiknya sistemnya bisa lebih sederhana lagi karena LKMA kan harus melaporkan uang yang beredar namun mereka masih belum terbiasa dengan sistem yang ada,” ucapnya.

Rantai Program Bertaut, Dana UMi Bersambut

Teks Reni Saptati D.I

Memanfaatkan kearifan lokal, program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) berhasil cepat menjangkau dunia usaha mikro lapisan terbawah di Indonesia. Per Februari 2020, sebanyak Rp5,871 triliun telah disalurkan kepada 1.925.101 debitur. Menggaet Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), UMi terang menyasar debitur yang tidak bankable. Tujuannya jelas, agar mereka mandiri berusaha dan bisa naik kelas.

Teks Reni Saptati D.I

Mayoritas debitur adalah perempuan karena lebih kreatif dalam memenuhi kebutuhan, menggunakan pendapatannya untuk keluarga, dan disiplin dalam pengembalian pinjaman.

Foto
Anas Nur
Huda

Memberdayakan dan memperkuat alam rantai program pemerintah, pembiayaan UMi merupakan tahap lanjutan dari bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) menuju program yang mendukung kemandirian usaha seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), tutur Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Ririn Kadariyah. Sejak awal kelahiran UMi, PIP menjadi *coordinated fund* pembiayaan yang memiliki plafon maksimal Rp10 juta per debitur tersebut.

“PIP tidak menciptakan lembaga penyalur baru, tetapi memberdayakan (*empowering*) dan memperkuat (*enhancing*) Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang sudah ada, berpengalaman dalam pembiayaan UMKM selama minimal dua tahun, dan mendukung kearifan lokal,” jelas Ririn. Saat ini, tambahnya, PIP menunjuk tiga LKBB sebagai penyalur.

Ketiganya yakni PT Permodalan Nasional Madani/ PNM (Persero), PT Pegadaian yang melakukan penyaluran langsung, serta PT Bahana Artha Ventura (BAV) yang melakukan penyaluran tak langsung melalui lembaga *linkage* seperti Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA). Ririn menyatakan mereka diharuskan melakukan pendampingan kepada debitur, baik secara individual maupun kelompok selama periode masa pembiayaan. Bentuknya

bisa berupa pemberian motivasi, konsultasi, peningkatan kapasitas SDM, pengawasan terhadap debitur, atau bentuk lainnya.

“Selain kerja sama dengan para penyalur, PIP juga dimungkinkan untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah atau pihak lainnya,” ungkap Ririn. Sejumlah kerja sama yang telah dilakukan antara lain kerja sama pendanaan dengan Pemda Bone Bolango, kerja sama program dengan PT SMI (Persero), dan kerja sama program dengan Universitas Gadjah Mada.

Debitur mayoritas perempuan

Pada kesempatan berbeda, Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Djoko Hendratto menjelaskan pengajuan pembiayaan UMi oleh debitur mengutamakan kemudahan dan kecepatan. “Syarat mudah dan cepat lebih dibutuhkan oleh masyarakat miskin,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan penyaluran pembiayaan UMi juga menerapkan kegiatan monitoring dan evaluasi. Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai garda terdepan Kementerian Keuangan di daerah turut dilibatkan dalam kegiatan itu.

“KPPN mengawal ketepatan sasaran yang menjadi tugas pemerintah dalam melaksanakan amanahnya mengawal keuangan negara,” Djoko menerangkan. Secara triwulanan, KPPN melakukan monitoring ketepatan data penyaluran. Hasilnya menjadi salah satu komponen penilaian

“PIP tidak menciptakan lembaga penyalur baru, tetapi memberdayakan (*empowering*) dan memperkuat (*enhancing*) Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang sudah ada, berpengalaman dalam pembiayaan UMKM selama minimal dua tahun, dan mendukung kearifan lokal .”



Ririn Kadariyah
Direktur Utama PIP

kinerja dan tingkat kepatuhan penyalur dan lembaga *linkage* serta menghasilkan *early warning system* apabila terdapat penyimpangan.

Uniknya, data PIP menunjukkan sekitar 95 persen debitur penerima UMi adalah perempuan. Sejumlah penyalur memang mengadopsi skema pembiayaan untuk pelaku usaha mikro yang disalurkan secara berkelompok kepada perempuan prasejahtera. Diantaranya ialah PNM dan Koperasi Mitra Dhuafa.

Kedua penyalur tersebut mengakui perempuan lebih mampu bertahan hidup di sektor informal. Tak hanya itu, mereka juga menyebut perempuan lebih kreatif dalam memenuhi

Syarat untuk mendapatkan UMi



Tidak sedang dibiayai oleh lembaga keuangan/koperasi



WNI dibuktikan dengan NIK Elektronik



Memiliki izin usaha/keterangan usaha dari instansi pemerintah dan/atau surat keterangan usaha dari penyalur



kebutuhan, cenderung lebih menggunakan pendapatannya untuk keluarga, dan lebih disiplin dalam pengembalian pinjaman. Berdasarkan *best practice* pada sektor *microfinance* pada umumnya, debitur perempuan yang disalurkan secara berkelompok memiliki performa pinjaman yang sangat baik dengan tingkat *Non Performing Loan* (NPL) di bawah 1 persen.

“Dengan pembiayaan UMi ini, para debitur perempuan diharapkan dapat menyadari potensi kewirausahaannya dan memiliki posisi yang strategis dalam keluarga,” harap Ririn. **Optimalisasi Penyaluran Melalui Digitalisasi**

Desain pembiayaan UMi telah memanfaatkan teknologi informasi dari mula diluncurkan, tegas Djoko Hendratto. “Sejak awal, desainnya harus menggunakan itu supaya mampu menjangkau seluruh wilayah di Indonesia,” jelasnya. Ia menyebut penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) UMi untuk meningkatkan aksesibilitas dan akuntabilitas penyaluran UMi sebagai tahap pertama pemanfaatan teknologi informasi.

Selanjutnya, untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan ketepatan sasaran, UMi memasuki tahap kedua pemanfaatan teknologi informasi yang dikenal sebagai tahap digitalisasi. Pada akhir 2018, digitalisasi pembiayaan UMi secara resmi diluncurkan Menteri Keuangan. Kala itu, PIP menggandeng tiga platform uang elektronik dan satu platform *marketplace*.

“Itu sangat inovatif dan kreatif. UMi dengan konsep *enhancing and empowering* tidak perlu membangun sistem yang begitu rumit, tetapi memanfaatkan sistem yang ada,” ucap Djoko bersemangat.

Dalam perkembangan terakhirnya, Ririn menceritakan saat ini pihaknya tengah mengembangkan ekosistem ekonomi digital dalam bentuk sistem tol data/join tuntas bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Desa dan PDT, BLU LPDB dan BLU lainnya yang telah bekerja sama dengan PIP.

“Sistem ini diharapkan dapat menciptakan *big data* UMKM yang pada akhirnya dapat digunakan bersama untuk

mengentaskan kemiskinan di Indonesia,” Ririn berujar. Ia menambahkan, ke depannya, digitalisasi tidak hanya terbatas pada *disbursement*, tetapi juga ke arah pengembangan *e-wallet*. “Hal ini dilakukan untuk memudahkan debitur UMi dalam bertransaksi menggunakan uang elektronik dan memudahkan dalam melakukan analisa perilaku ekonomi debitur pembiayaan UMi,” jelasnya.

Kemampuan bertahan di tengah krisis

Pemerhati UMKM Dr. Asep Mulyana memberikan apresiasi terhadap program pembiayaan UMi. “Saya melihat ini sangat positif bagi perekonomian Indonesia. Apalagi kalau nanti dari usaha ultra mikro bisa naik menjadi usaha mikro,” tutur akademisi Universitas Padjadjaran tersebut. Namun, ia juga menjelaskan bahwa tidak semua usaha mikro bisa *scale up*. “Contoh yang paling gampang warteg. Ia tidak bisa *scale up* usahanya, tetapi paling tidak bisa tambah cabang,” lanjutnya.

Untuk memperbesar keuntungan mereka, Ketua Pusat Inkubasi Bisnis Universitas Padjadjaran itu menyarankan para pemilik usaha mikro agar berkoperasi. “Dengan berkoperasi keuntungan akan menjadi meningkat karena dari sisi *supply*-nya lebih murah,” tutur Asep. Ia menilai program UMi ini menjadi insentif awal dalam membangkitkan koperasi lantaran bunganya yang murah.

Mengomentari kondisi ekonomi nasional ke depan yang kemungkinan menurun akibat wabah Covid-19, ia optimis UMKM bisa tetap bertahan. “Semua pelaku usaha dalam kondisi apapun harus selalu optimis. Mengapa? Pasar selalu ada di Indonesia,” kata Asep. Selama ini, ucap Asep, UMKM telah menjadi penopang perekonomian Indonesia. Pada saat krisis ekonomi 1998, mereka tetap mampu bertahan, bahkan menjadi penyelamat ekonomi nasional.

Menurut data PIP, sejak diluncurkan pada pertengahan 2017, pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp8 triliun. Sebanyak Rp7 Triliun telah dicairkan dari APBN dan dikelola PIP untuk digulirkan kepada masyarakat, sedangkan Rp1 Triliun merupakan dana yang dialokasikan di APBN tahun 2020. Asep berharap alokasi dana untuk program pembiayaan UMi ini dapat meningkat. “Harus diperbesar. Barangkali dibuat lebih menjadi *double*, bahkan *triple*.”

Dana BOS langsung disalurkan ke rekening sekolah

Tahap I
(paling cepat
bulan Januari) **30%**

Tahap II
(paling cepat
bulan April) **40%**

Tahap III
(paling cepat
bulan September) **30%**



Dana Desa langsung disalurkan ke rekening desa

Tahap I
(paling cepat bulan Januari
dan paling lambat bulan Juni) **40%**

Tahap II
(paling cepat bulan Maret
dan paling lambat bulan Agustus) **40%**

Tahap III
(paling cepat bulan Juli) **20%**



MENAIKKAN LEVEL KESEJAHTERAAN MELALUI

Program Umi

Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan Unit Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) menjadi penting mengingat UMKM memiliki peran besar dalam kegiatan ekonomi Indonesia. Kementerian Keuangan melalui Pusat Investasi Pemerintah turut berperan serta menjalankan program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Debitur non bankable adalah sasaran utama program ini. Sejauh mana program UMi telah membantu mengembangkan sektor usaha mikro?



Perkembangan Jumlah Debitur dan total penyaluran UMi

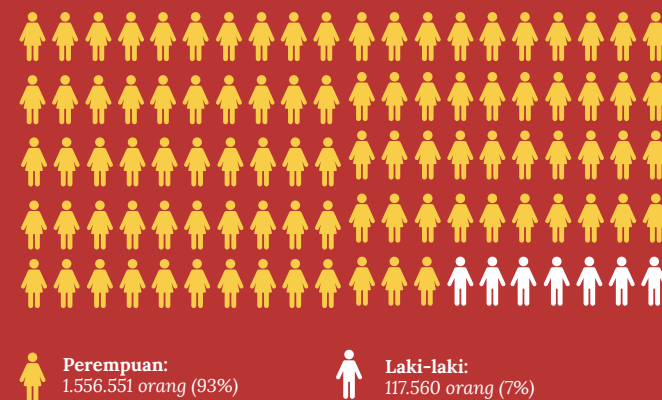


● Debitur
● Penyaluran

Profil Debitur Umi berdasarkan Usia



Jumlah Debitur UMi berdasarkan Gender





UMi membantu para pengusaha mikro di penjuru Indonesia untuk merealisasikan mimpi-mimpinya

Foto
Resha Aditya

Meniti Mimpi Bersama UMi

Teks Dimach Putra

UMi merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian dalam berusaha. Program ini menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah. Para pengusaha kecil ini belum tersentuh layanan perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pembiayaan yang disalurkan memang tidak terlalu besar, maksimal 10 juta per debitur. Persyaratan untuk pengajuannya pun sangat mudah.

Baru tiga tahun hadir, UMi sudah mampu menyentuh hidup jutaan pengusaha mikro di penjuru Indonesia. Sudah banyak keluarga yang merasakan

dampak dan manfaatnya. Meski tidak banyak, bantuan pembiayaan ini perlahan mampu meningkatkan kesejahteraan *wong cilik*. Mereka tak lagi takut bermimpi. Mimpi mereka digantungkan bersama pertumbuhan usaha yang mereka.

Mengeliminir rentenir

“Jadi sebenarnya program UMi ini intinya bicara mengenai literasi keuangan, bagaimana mereka (masyarakat) tersentuh oleh *financial aspect*. *Tagline*-nya adalah mudah dan cepat. Jadi tidak ada birokrasi. Kalau nggak, nanti lawan kita di lapangan adalah rentenir yang selalu ada di

lapangan. Nah itu mungkin awal dari mengapa mikro (UMi) itu muncul pada 2017,” ucap Agus Wicaksono, Direktur Pembinaan Usaha, Investasi dan Pembiayaan Bahana Artha Ventura (BAV).

Sebagai salah satu Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang bekerjasama dengan Pusat Investasi pemerintah (PIP) dalam menyalurkan UMi, pembiayaan di BAV tidak langsung diberikan kepada pelaku usaha tapi lewat koperasi. Skema tersebut lebih sesuai karena jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang sifatnya *non-bank*, koperasi memiliki dua kaki, yakni *landing* dan *funding*. “Dia belajar menabung, tapi dia belajar meminjam. Kalau hanya satu sisi aja, misalnya *landing* aja nanti posisinya akan susah karena saat dia ada masalah nggak punya tabungan,” ungkap Agus.

Kekhasan penyaluran UMi adalah perlu banyaknya pendekatan personal kepada para debitur. Di World Bank istilah yang pas adalah *high touch*. Komponen terbesar dari struktur biaya bukan di *cost of fund*, tapi terletak pada monitoring, pendampingan, dan lainnya. Sekali lagi, tujuan diluncurkannya UMi adalah literasi keuangan dan kesinambungan program peningkatan kesejahteraan masyarakat dari penerima bantuan sosial menuju kemandirian berusaha. Target berikutnya adalah bagaimana para pengusaha mikro ini dapat terus mengembangkan usahanya hingga dapat menjangkau Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang *bankable*.

Masifnya persebaran pembiayaan UMi membuat rentenir yang semula banyak menjerat para pengusaha kecil perlahan minggir. Koperasi sebagai sokoguru penyaluran pembiayaan ini makin berkembang. Jutaan debitur UMi merasa terbantu dengan sistem pembiayaan seperti ini. Kisahnya tesebar hingga penjuru negeri.

Mimpi kecil tari

Tari adalah salah satu debitur yang telah bergabung sejak awal kehadiran UMi di tahun 2017. Perempuan asal Banyubiru, Jawa Tengah ini awalnya memang sudah memiliki usaha produksi keripik ikan wader. Usaha rumahan yang ia rintis tersebut telah mampu memproduksi 100 kg keripik per bulan. Sebenarnya permintaan pasar jauh melampaui kemampuan produksi usaha Tari. Untuk itu, ia berniat mengembangkan usahanya.

Butuh waktu bagi Tari untuk mencari-cari bantuan pembiayaan dengan syarat yang masih sesuai dengan kemampuannya. Untungnya, saat itu ia telah tergabung menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nusa Ummat Sejahtera (KSPPS NUS). Sebagai penyalur pembiayaan, koperasi itulah yang

memperkenalkan Tari pada UMi.

“Saat itu saya ambil 10 juta. Uangnya langsung saya pakai buat mengembangkan kapasitas produksi,” cerita Tari. Sebelumnya, Tari hanya mampu menghasilkan 100 kg per bulan. Kini ia mampu membuat hingga 350 kg keripik per bulannya. Pemasaran produk industri rumah tangga yang dirintis Tari telah mampu menjangkau seluruh Pulau Jawa. Bahkan kini ia bisa mengirim produknya lebih jauh lagi karena telah dipasarkan di *online marketplace*.

Tari bersyukur karena usaha kecil yang ia kerjakan di ruangan di samping rumahnya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tak hanya bagi keluarganya sendiri, beberapa tetangga pun kecipratan karena menjadi pegawai produksi keripik ikan wader Tari. Ada satu harapan terselip darinya. “Harapannya *tuh* plafon pinjamannya ditambah. Saat ini saya tengah mengembangkan varian produk dan juga ingin menambah lagi kapasitasnya. Masih butuh bantuan seperti UMi, karena belum mampu untuk naik ke KUR (Kredit Usaha Rakyat),” ucapnya berharap.

Bersama membangun usaha keluarga

Berbeda dengan Tari, Adhi Parwata merupakan debitur baru UMi. Baru Januari kemarin ia mendapat bantuan pembiayaan UMi. Ia memperoleh suntikan dana dari salah satu penyalur UMi di Bali yang bernama Koperasi Krama Bali. Namun sama halnya dengan Tari, Adhi menganggap bahwa pembiayaan dari pemerintah ini sangat membantunya.

“Prosesnya sangat mudah dan tidak berbelit. Tidak ada agunan juga, sehingga memudahkan kami

pengusaha kecil yang belum punya apa-apa,” jelasnya. Sebenarnya pembiayaan yang Adhi dapatkan tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha kecil milik istrinya, Sri Wulandari. Sang istri membuka pesanan catering kue dan jamu kecantikan. Dari 10 juta yang mereka ambil, sebagian besar digunakan untuk belanja modal berupa peralatan produksi kue dan jamu. Saat ini usaha kecil yang dirintis keluarga mereka bahkan sedikit kewalahan menerima pesanan. Meski sudah dibantu dua orang pegawai.

Sebagai debitur baru, Adhi sudah merasakan sekali manfaat dan keunggulan UMi. Koperasi sebagai penyalur pembiayaan tidak serta merta melepas debitur untuk berkembang sendiri-sendiri. Beragam program pendampingan kerap diadakan. Baru tiga bulan bergabung, usaha milik Adhi dan Sri sudah beberapa kali diajak pameran keliling Bali. Dari pameran tersebut, Adhi berhasil memasarkan produknya lebih luas. Ia percaya testimoni konvensional dari mulut ke mulut justru yang membuat produknya dipercaya pelanggan.

Ke depan pasangan suami istri ini ingin lebih aktif bergabung dengan jaring komunitas debitur UMi yang dirajut oleh koperasi tempat mereka bernaung. Mereka yakin koneksi yang terbangun akan menambah pengetahuan bagi mereka, sekaligus membantunya membesarkan usaha keluarga. Bahkan mereka bermimpi untuk terus mengembangkan usahanya hingga bisa diturunkan kepada anak-anaknya. “Saya pengennya anak-anak ikut usaha ini saja. Saya bahkan sudah membayangkan dua lokasi yang cocok untuk mengembangkan usaha ini,” sebut Adhi.

Peduli Pada yang Papa

Teks CS. Purwowidhu

Se seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama atas akses pembiayaan usaha, tak terkecuali 40 persen masyarakat yang berada pada lapisan bawah. Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) hadir bagi seluruh masyarakat prasejahtera dari Sabang hingga Merauke yang terkendala dalam mengakses pembiayaan. Bukan semata untuk mengentaskan kemiskinan, UMi juga diandalkan sebagai katalisator program-program pemerintah lainnya untuk memberdayakan masyarakat prasejahtera agar bisa naik kelas. Simak wawancara Media Keuangan dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Andin Hadiyanto, seputar kiprah UMi dalam hampir tiga tahun perjalanannya sejak diluncurkan pada pertengahan 2017 silam.

Bagaimana progress penyaluran pembiayaan UMi?

Pertumbuhan debitur signifikan dari sejak dimulai di 2017. Sampai dengan 29 Februari 2020, kita telah menyalurkan pembiayaan ke 1.775.814 debitur di seluruh Indonesia. Dananya juga dinaikkan dari 1,5 T pada tahun 2017 hingga menjadi 8T sampai dengan akhir tahun 2020. Ini merupakan skema dana bergulir yang mengedepankan prinsip kemandirian.

Apa saja kunci sukses program pembiayaan UMi?

Ada aspek keberpihakan, pemberdayaan, dan penguatan, intinya di situ. Keberpihakan itu karena bunga UMi dari PIP sekitar 2-4 persen. Bahkan ini sedang proses untuk diturunkan lagi. Jadi 60 persen biayanya itu ada di SDM tenaga pendamping, yang jasanya tidak terukur dengan uang karena mereka memberi *value added* yang tinggi untuk peserta UMi.

Selanjutnya, aspek penguatan lembaga keuangan yang ada, dalam konteks pendalaman sektor keuangan. Berkaitan dengan *financial inclusion*, kita memikirkan bagaimana masyarakat ultra mikro mulai dari pedagang asongan, tukang sayur, industri rumahan yang tidak tersentuh perbankan ini bisa mengakses dana melalui lembaga yang sudah ada, seperti Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan

PT Bahana Artha Ventura (BAV).

Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Dari pengalaman saya bertemu para debitur di daerah, seperti di Bali dan Makassar, mereka ada pendampingan setiap minggu yang membina mereka melakukan kegiatan usaha dan pengadministrasiannya. Dengan begitu kita mengajari masyarakat untuk produktif.

Seberapa besar tingkat NPL (*Non-Performing Loan*) UMi?

Sampai saat ini NPL di *end user* berada pada tingkat terkendali di bawah 5 persen. Dibandingkan dengan bank, NPL UMi relatif lebih rendah. Luar biasanya karena ini tanpa agunan. Pembiayaan lebih baik dilakukan secara berkelompok karena ada nilai gotong royong dan tanggung renteng yang dibangun. Kalau ada satu anggota yang tidak bisa bayar, ditanggung oleh kelompoknya sehingga mengamankan dana yang ada supaya NPLnya rendah.

Mengapa debitur UMi 90 persenan perempuan?

Mungkin karena karakter wirausahanya ya, tingkat kepatuhannya juga tinggi. Rata-rata ini juga ibu-ibu yang bantu suaminya, karena suaminya sudah punya kerjaan utama. Pinjamannya juga relatif kecil, untuk pemula paling cuma antara 2-5 juta untuk dibayar per minggu selama 10 bulan dan betul-betul untuk modal itu. Ibu-ibu itu tekun banget, senang banget diberikan pendampingan secara rutin dan berkelompok. Ini membuat ibu-ibu semakin produktif.

Bagaimana upaya menjaga kesinambungan UMi?

Dari segi pendanaan, semampu mungkin dananya nanti kita tambah. Bisa melalui APBN, kerja sama dengan pemda, dan lembaga-lembaga lainnya. Ke depan, kita akan membuat MoU dengan beberapa pemda, seperti dengan Pemda Bone Bolango. Pemda ini ingin bantu masyarakat ultra mikro di daerahnya, mereka punya

dana tapi tidak punya skema. Jadi kita bantu salurkan dengan skema UMi. Selain pemda, kita juga akan menyasar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah mapan untuk menjadi penyalur UMi. Kita juga akan menerbitkan Efek Beragun Aset (EBA). Yang menjadi jaminan adalah piutang kita kepada debitur, karena piutangnya lancar, kita keluarkan surat berharga. Ini bisa dibeli oleh lembaga internasional di pasar modal. Jadi mengurangi ketergantungan terhadap APBN untuk penambahan modal.

Kesinambungan lain adalah dari segi kerja sama, terutama dalam penyaluran, untuk pengembangan dan optimalisasi debitur. Kita akan tambah lembaga penyalur karena tidak di semua tempat ada Pegadaian, PNM, dan BAV. Kita mau dorong PNM untuk daerah-daerah yang lebih *remote*. Kita ada kerja sama dengan Kementerian Koperasi untuk membina koperasi hingga layak menjadi lembaga penyalur, dengan Kementerian Pertanian yang membina Lembaga Kredit Mikro Agribisnis (LKMA) yang terdiri dari gabungan kelompok tani. Kita mau lihat kelayakan 700 LKMA untuk menjadi lembaga penyalur UMi. Kerja sama dengan Kementerian Sosial dalam *sharing* data antara Program Keluarga Harapan (PKH) dengan UMi sehingga penerima PKH juga mampu dijangkau UMi.

Jadi ini seperti berjenjang untuk menaikkan kelas masyarakat prasejahtera?

Ya, berjenjang, ini memang pekerjaan besar. Jadi peserta PKH yang punya usaha kita jadikan target peserta UMi. Nanti, dari peserta UMi itu kalau sudah lulus, kita jadikan target Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mikro. Kalau sudah lulus lagi, kita targetkan ke KUR yang lebih besar.

Bagaimana memastikan UMi bisa tepat sasaran?

Bahwa yang sudah dapat UMi

tidak boleh dapat KUR, yang dapat KUR tidak boleh dapat UMi pada saat yang bersamaan, nah, ini sekarang sudah mulai bagus, datanya sudah tidak mungkin *double* karena ada dalam satu *database* yang sama, Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Ini juga modal besar untuk keberlanjutan, punya IT sistem yang bagus.

Kita juga sudah buat sistem manajemen agar Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN semua menjadi bagian dalam monitoring dan evaluasi pembiayaan UMi untuk memastikan penyalurannya sesuai ketentuan dan diberikan ke orang yang tepat.

Upaya apa yang dapat dilakukan untuk memperluas jangkauan UMi sampai ke pelosok Indonesia?

Saran saya melalui BUMDes, saya lihat prospektifnya bagus karena selama ini mereka didukung BUMN juga. Jadi desa itu sekarang kalau infrastrukturnya sudah bagus, mereka geser penggunaan dananya untuk pemberdayaan masyarakat. Sebagian untuk BUMDes, sebagian lagi untuk pelestarian budaya misalnya. Kita juga akan minta Kanwil untuk *piloting* desa binaan, kalau sudah bagus bisa direplika di desa-desa lain. Koperasi di daerah juga semoga makin berkembang ya.

Harapan Bapak untuk program UMi?

Harapannya, satu, dari sisi debiturnya yang sudah dapat UMi kalau bisa dia naik kelas jadi dapat KUR. Dua, memperluas jangkauan UMi semaksimal mungkin dan ekstensifikasi pendanaan seoptimal mungkin dengan mekanisme dan skema yang ada. Tentu pada akhirnya ini dapat membantu kita mengentaskan kemiskinan. Lapisan bawah ini jangan sampai terabaikan karena pada saat krisis justru orang-orang ini yang paling *survive* dan menyelamatkan negeri ini.

AndinHadiyanto,
Dirjen
Perbendaharaan

Foto
Resha Aditya

KREASI LAIN

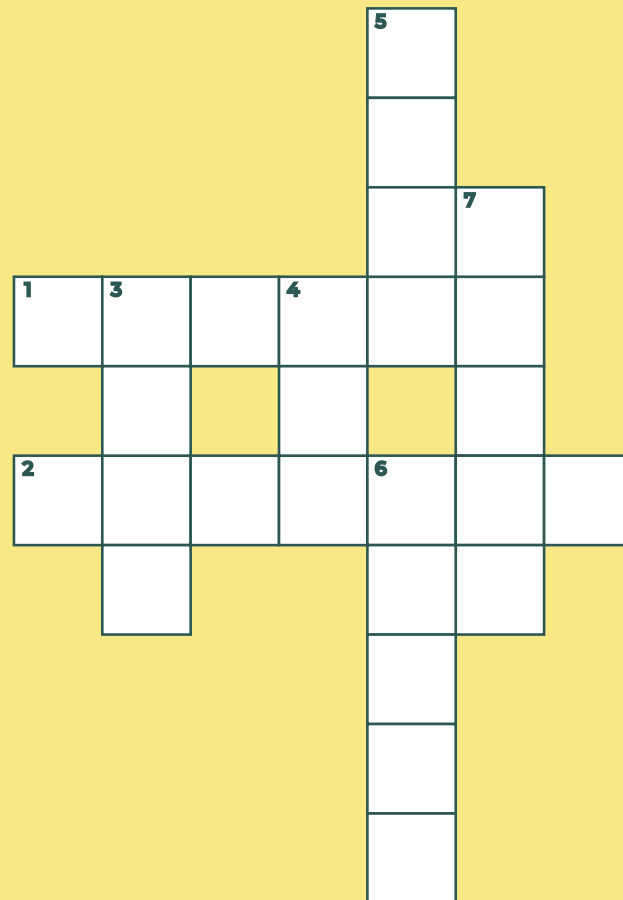
Kain Pantai

Terletak di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, kain pantai Mojolaban mungkin masih jarang didengar. Kerajinan tekstil ini memang belum menjadi produk andalan ekspor Indonesia. Namun, popularitasnya mulai merangkak naik, bukan hanya kualitasnya, tapi juga proses produksinya yang memikat. Dimulai dari proses yang cukup panjang dari mewarnai, menyablon, mencuci, sampai membentangkan dan menjemur di padang rumput.

Foto dan Teks
Resha Aditya P



*Teka *Teki *Mediaku*



Mendatar

1. Nama lazim virus jenis 2019-nCoV
2. Selalu merasa khawatir

Menurun

3. Organisasi negara eksportir minyak
4. Obligasi Ritel Indonesia
5. Lembaga Manajemen Aset Negara
6. Obligasi berbasis syariah
7. Kontribusi wajib kepada negara

Kirim jawaban Anda melalui story post instagram dengan tag IG @majalahmediakuangan atau melalui email mediakuangan@kemenkeu.go.id, sertakan nama dan nomor telepon yang dapat dihubungi

Jawaban kami tunggu sampai tanggal 10 Mei 2020.

REGENERASI KUNCI ANGKAT PRESTASI

Teks Reni Saptati D.I

Susi Susanti,
Kepala Bidang
Pembinaan
dan Prestasi
PBSI

Foto
Resha Aditya

Emas pertama di Olimpiade Barcelona persembahkan Susy Susanti menjadi momen tak terlupakan bagi rakyat Indonesia.

Prestasi di bidang olahraga nyata harumkan nama bangsa di kancah dunia. Demi bisa menorehkan prestasi, istri Alan Budikusuma tersebut harus melewati perjuangan berat dan penuh pengorbanan.

Kini, Susy dipercaya sebagai Kepala

Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Pinpres) di Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI). Tugasnya tak kalah berat dengan target emas Olimpiade 28 tahun silam. Ia harus mampu mengerek prestasi bulu tangkis Indonesia dan menciptakan proses regenerasi secara berkesinambungan. Simak perbincangan kami dengan wanita kelahiran Tasikmalaya tersebut berikut ini.

Bagaimana prestasi bulu tangkis Indonesia beberapa tahun terakhir?

Sebagai Kabid Binpres, saya bertanggung jawab atas prestasi bulu tangkis Indonesia secara keseluruhan. Tugas saya tidak hanya membina, tetapi juga membuat sistem dan program agar bisa mengembalikan kejayaan dan memopulerkan bulu tangkis. Dengan demikian, bibit-bibit unggul bisa terus ada.

Kalau sudah ada bibit, pembinaan dan sistem akan berjalan baik. Dan tentunya regenerasi juga akan berjalan baik. Dengan sendirinya, prestasi bisa tercapai. Dari 2017 sampai 2020, prestasi sudah meningkat dan kepopuleran bulu tangkis juga naik lagi. Euforianya salah satunya di Asian Games 2018.

Setelah 20 tahun tunggal putri minim prestasi, pada 2017 juara dunia junior lahir. Di beregu, kita membuat sejarah *hattrick* juara beregu Asia. Lalu, ada juara dunia dan juara All England juga. Jadi, dari tahun ke tahun peningkatan prestasi sudah mulai terlihat.

Apa strategi Ibu supaya bulu tangkis bisa tetap berprestasi?

Saya pernah jadi pemain. Arahan dari Ketua Umum kami adalah bagaimana mengembalikan kejayaan bulu tangkis. Tentunya itu tidak lepas dari regenerasi dan pembinaan yang berkesinambungan. Itu yang saya terapkan. Sebelumnya, Pelatnas tidak

sebanyak sekarang. Tapi waktu jaman saya dulu, saya pernah merasakannya. Apa yang sudah berhasil saat itu saya aplikasikan lagi saat ini. Sekarang saya membuat Pelatnas Utama, Pelatnas Pratama, bahkan Pelatnas Junior. Jadi, ada tiga lapis.

Supaya ada regenerasi?

Betul. Sebelumnya hanya Owi Butet saja. Sekarang ada Jojo, Ginting, Kevin. Hendra Ahsan juga masih ada. Lalu ada Praveen, Meli, dan juga Gregoria. Juara ganda junior juga muncul lagi, yaitu Leo dan Daniel.

Kita terus membuat prestasi sesuai tingkatan masing-masing. Harapannya, setiap level ada idola. Ini akan menarik minat anak muda dan anak kecil. Dengan adanya prestasi, kepopuleran bulu tangkis akan naik lagi sehingga kita bisa memasalkan olahraga di masyarakat. Dari sebelumnya orang mau main karena hobi, bisa menjadi profesional.

Lalu, dengan semakin banyaknya pertandingan, ada pula hadiah *fresh money*. Paling tidak orang tua juga akan berpikir, “Oh, ini ada dana yang buat ganti.” Jangan dianggap bahwa mereka mata duitan. Sebenarnya itu untuk membiayai anak supaya bisa tercukupi gizinya, terpenuhi juga program-program yang akan diikuti.

Gizi dan mental harus dari awal disiapkan. Ini seperti kita bangun gedung. Tiang-tiangnya harus kuat. Banyak atlet dari kalangan keluarga kurang mampu. Ketika digenjut latihannya, mereka sering sakit karena dari awalnya sudah kurang gizi. Kini kami bukan hanya mencari bibit, tetapi juga bekerja sama dengan pihak swasta untuk memberikan edukasi tentang gizi.

Tim putra kita cukup kuat. Bagaimana dengan target Thomas Cup?

Tahun ini boleh dibilang kita memiliki peluang yang besar karena kekuatan putra sangat kuat. Setelah beberapa puluh tahun, kita berharap

bisa mengembalikan Thomas Cup ke ibu pertiwi. Itu target kita tahun ini. Untuk beregu ada Thomas Cup dan puncaknya olimpiade.

Kalau tim putri sendiri bagaimana?

Harus kita akui tim putri masih agak di bawah tim lainnya. Namun, secara perorangan masih ada beberapa prestasi, khususnya di ganda putri. Untuk tunggal putri, karena memang atlet kita baru pindah dari junior ke senior, otomatis masih butuh waktu untuk pematangan. Mudah-mudahan kita bisa menyumbangkan medali di olimpiade. Semua sektor cukup punya peluang, kecuali tunggal putri yang masih harus mengejar.

Apakah ada kesulitan dalam mencari bibit tunggal putri?

Ada. Tunggal putri ini unik. Mungkin karena kita memiliki adat ketimuran sehingga banyak orang tua yang kurang mendukung anak perempuannya menjadi atlet. Tantangannya kan berat sekali. Pertama, harus kerja keras. Kedua, takut bodinya berotot. Ketiga, jauh dari orang tua. Keempat, kepastian masa depan.

Adat timur ini menjadi satu tantangan buat kita untuk mendapatkan banyak bibit. Ke depannya, dengan adanya ikon atlet, penghargaan, serta kepastian masa depan, kita harap orang tua juga mau. Laki-laki perempuan sebetulnya sama-sama bisa jadi atlet. Ini emansipasi.

Justru saya selalu mengatakan bahwa perempuan tidak memiliki saingan sebanyak laki-laki. Saya kan merasakan juga. Memang butuh kerja keras. Untuk jadi juara itu memang tidak mudah, kita tidak boleh bosan, mesti kerja keras, pantang menyerah, dan tahan banting

Sekarang ada Covid-19. Apakah berpengaruh terhadap turnamen?

Sangat. Di Italia pada saat atlet kita



sedang bertanding dan semua masuk final, pertandingan dibatalkan. Akhirnya tidak ditandingkan. Sangat merugikan. Tapi dalam suasana yang kurang kondusif seperti sekarang, kita mau tidak mau ikuti kan. Kita berjaga-jaga saja jangan sampai atlet terkena.

Apa keunggulan atlet bulu tangkis Indonesia dibanding negara lain?

Semua negara mengakui bibit indonesia paling bagus dibanding negara lain. Kenapa seperti itu? Kalau Cina, Korea, dan beberapa negara lain itu, juara seperti dibikin duplikatnya. Tapi di Indonesia itu berbeda-beda, mereka punya keunikan sendiri. Tiap daerah punya keunikan cara bermain. Jadi, bibit itu muncul dari alam.

Contohnya Taufik Hidayat dan Ginting dari Jawa Barat. Mereka punya pukulan aneh dan tipuan. Lalu, akurasi pukulannya taktis. Berbeda dengan Jawa Tengah, seperti Joko Suprianto.

Dia lebih punya *stroke* teknik yang bagus dengan *rally* taktis. Jadi, mereka memiliki keanehan dan keunikan sendiri.

Untuk event besar biasanya ada bonus dari pemerintah. Bagaimana atlet menyikapinya?

Pastinya bonus itu menjadi motivasi dan penghargaan bagi atlet. Mereka kan belum ada jaminan dari pemerintah. Otomatis mereka harus pintar menabung saat dapat bonus supaya bisa mempersiapkan masa depannya.

Masa era prestasi atlet ini kan mentok sekitar usia 30 tahun. Di saat orang lain pada usia tersebut yang sekolah dan bekerja mulai menanjak karir dan prestasinya, atlet itu pasti turun.

Seperti apa bentuk *reward* di negara lain?

Hampir semua negara yang bulu tangkisnya kuat memberi jaminan seumur hidup. Sekarang Thailand saja

memberi jaminan seumur hidup. Kalo Cina jangan ditanya. Ketika dapat juara dunia atau olimpiade pasti akan dapat jaminan seumur hidup. Biaya hidup semua gratis, mulai listrik, sekolah, bahkan sampai anak-anaknya. Ini berlaku juga di Vietnam dan Thailand. Malaysia kalau tidak salah juga sudah.

Pesan buat generasi muda ini apa?

Saya selalu berpesan kepada generasi muda, isi waktu dengan sebaik baiknya. Lalu berprestasilah sesuai bidangnya masing-masing. Mimpikanlah setinggi mungkin apa yang diinginkan. Capailah setinggi mungkin cita-cita yang diinginkan.

Dengan adanya harapan dan cita-cita, hidup ini punya tujuan. Dengan demikian, kita tidak tergoda dengan hal negatif. Dengan adanya tujuan, kita pasti akan berbuat yang positif untuk mencapai tujuan itu.



Gedung
KPKNL
Ternate

Foto
Dok. KPKNL
Ternate

KPKNL TERNATE

Teladan Perubahan dari Timur

Teks A. Wirananda

Sejak resmi dibentuk pada 2002, kantor ini tak pernah memiliki tempat bernaung yang tetap. Senantiasa berpindah-pindah menurut nasib. Perlahan, seiring perkembangan teknologi dan layanan, nasib baik mulai merapat menyambangi kantor ini. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ternate akhirnya memiliki gedung tetap setelah selama empat tahun terakhir mendiami gedung milik Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate. Gedung baru berjudul Gedung Kolaboratif Kementerian Keuangan ini berdiri di atas aset hasil optimalisasi barang milik negara yang melibatkan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta tentu saja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sinergi berbuah manis. Gedung tiga lantai ini menerima sambutan luar biasa dari berbagai kalangan.

Pembuktian Maluku Utara

Tak main-main, gedung baru milik KPKNL Ternate ini memuat banyak nilai sekaligus memiliki visi menyebarluaskan nilai itu. Selain penampilan yang modern, kantor yang dikomandoi oleh Mokhammad Arif Setyawantika ini juga menerapkan konsep ruang

kerja kekinian, ruang kerja berbasis aktivitas (*activity based workplace*). Selain itu, kantor baru ini juga telah mengakomodasi pengarusutamaan gender, pengembangan iklim digital, serta kemudahan akses oleh penyandang disabilitas. Eloknya, selain menjadi kantor dengan ruang kerja berbasis aktivitas pertama yang dibangun dari nol, KPKNL Ternate dibangun sepenuhnya oleh jemari lokal. “Full lokal, perencana itu dari lokal, kontraktornya (pelaksana) itu dari lokal, pengawasnya juga dari lokal,” ujarnya. “Dan, lelangnya kita tetap lelang *online*,” ia melanjutkan, “penawar dari luar juga ada.”

Lelaki kelahiran Blora ini mengatakan bahwa berdirinya gedung baru di masa jabatannya ini tak luput dari sinergi dan dukungan banyak pihak. “Kami sangat bersyukur didukung penuh oleh Pemerintah Kota Ternate, dukungannya luar biasa,” ia melanjutkan, “karena kita ingin sama-sama membuktikan dari Maluku Utara pun kita membangun gedung yang bertema industrial, modern, itu bisa dibangun di sini, oleh orang sini.” Dukungan dari pemerintah setempat menunjukkan sinergi yang terbangun baik untuk komitmen bersama. Dalam pembangunan gedung ini, Kementerian

Keuangan dan Pemerintah Kota Ternate berkomitmen untuk membuktikan bahwa modernisasi tidak hanya mampu berlangsung di pusat. “Ingin membuktikan kepada Indonesia bahwa Maluku Utara itu sanggup, Maluku Utara itu bisa menjadi contoh juga,” Arif menegaskan.

Setelah melalui sederetan proses legalitas, pengadaan gedung baru untuk KPKNL Ternate akhirnya rampung dibangun pada 2019. Semula, gedung ini tidak direncanakan untuk mengambil konsep ruang kerja berbasis aktivitas (*activity based workplace*). Namun, setelah terbit surat edaran Menteri Keuangan tentang penerapan ruang kerja berbasis aktivitas, KPKNL Ternate menyesuaikan diri.

Kental Nuansa Lokal

Tak hanya hal-hal modern yang muncul dari gedung KPKNL Ternate. Gedung ikonik ini sengaja dibangun untuk memunculkan identitas domestik. Gedung dengan bentuk kapal ini tentu bertujuan menunjukkan identitas Maluku Utara. Kapal merupakan moda transportasi utama di provinsi ini. Selain identitas Maluku Utara, kapal juga merepresentasikan KPKNL Ternate yang memiliki wilayah kerja berupa kepulauan. “Kami ingin menunjukkan,

ini lho transportasi utama kami, kebanggaan kami, yang bisa menjadi perekat masyarakat Maluku Utara yang otomatis juga bisa menjadi perekat bangsa kita,” ujar Arif.

Selain bentuk kapal, gedung ini juga memuat motif batik lokal di berbagai penjur. Pada sisi fasad, selain memuat logo Kementerian Keuangan, gedung ini menampilkan ukiran dengan motif batik Maluku Utara. Di dalam gedung, pada tiap pintu kaca yang menjadi sekat, motif batik Maluku Utara senantiasa menghiasi dengan manis.

Tak berhenti pada ranah penampilan, lebih dari itu, rancangan gedung yang ramah bagi semua kalangan ini diharapkan mampu memicu geliat ekosistem digital di Ternate. Masyarakat yang datang di KPKNL Ternate, mengikuti lelang digital (*e-auction*), atau memanfaatkan layanan lain diharapkan mendapatkan kesan positif dengan suasana yang dimunculkan KPKNL Ternate. Kesan positif inilah yang diharapkan mampu memicu geliat ekosistem digital di wilayah Ternate. “Dengan adanya kantor yang seperti ini, mereka (masyarakat) sudah melihat kondisi riilnya, bukan wacana lagi,” ujarnya.

Selain membangun kenyamanan tempat, pendekatan kepada masyarakat untuk memperkenalkan layanan digital yang dimiliki KPKNL Ternate tak pernah jemu didengungkan Arif dan jajarannya. Upaya ini diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang digelar baik mingguan maupun tahunan bersama dengan berbagai instansi, lembaga masyarakat, pun akademisi. Bahkan, sebagai bentuk kerja sama dan komitmen terhadap pendidikan, KPKNL Ternate mendedikasikan ruang lelangnya untuk dapat disulap sewaktu-waktu menjadi laboratorium mini bagi Universitas Khairun. Berbagai kegiatan bersama ini, kata Arif, membawa dampak baik bagi KPKNL Ternate. “Dengan kita kuat sinergi, dengan kita kuat kolaborasi, itu memudahkan semua,” ujarnya.



Fasilitas dan kegiatan di KPKNL Ternate

Foto Anas Nur Huda

LANGKAH MUDAH

Laporkan Pelanggaran



Whistleblowing System (WiSE)

adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena Kementerian Keuangan akan **merahasiakan identitas diri Anda** sebagai *whistleblower*.

- Register
- Login
- Pilih menu “Pengaduan”
- Pilih menu “Tambah Pengaduan”
- Lengkapi formulir

sertakan lampiran (dokumen atau foto) dengan klik tombol kotak kecil di bawah petunjuk. Lanjutkan prosesnya, lalu kirim.

***Simpan dengan baik username dan password Anda.** Kementerian Keuangan akan menghubungi Anda melalui saluran yang Anda cantumkan dalam *Form Pengaduan* apabila pengaduan yang Anda sampaikan belum memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti.

Keikhlasan Melakonkan Beragam Peran

DIAN LESTARI

Kepala Pusat Kebijakan Regional Dan Bilateral
Badan Kebijakan Fiskal



Perempuan di zaman yang sarat perubahan ini harus piawai berlakon peran. Bukan untuk menyembunyikan jati diri sebenarnya. Tapi untuk mampu bertahan dan menjalankan tanggung jawab yang susah payah diperjuangkan untuk didapatkan. Hal itu yang dirasakan Dian Lestari. Salah satu Srikandi mumpuni di Kementerian Keuangan. Ibu dari dua putri ini kini dipercaya menjadi Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral pada Badan Kebijakan Fiskal.

Tak mudah, memang. Tapi bagi perempuan yang akrab dipanggil Dian ini, tanggung jawab tersebut merupakan kepercayaan yang harus teguh ia jalankan. Jalan panjang telah ia lewati untuk bisa mencapai posisinya saat ini. Beragam peran pun telah berhasil Ia tunaikan dengan luwes. Dian lalu membagikan sedikit kisahnya.

Ikhlas jalankan penugasan

"Saya tidak pernah menolak penugasan. Jangankan penugasan, pekerjaan apapun yang relevan kalau pimpinan meminta saya untuk mengerjakan itu, pasti akan sebisa mungkin saya lakukan," ucapnya mengawali. Dian memutar ingatannya kembali ke akhir Agustus 2016. Ia mendapat mandat langsung dari atasannya untuk menempati posisi *Senior Advisor* di World Bank. Ia diminta mendampingi Andien Hadiyanto yang terlebih dulu ditunjuk menjadi *Executive Director*.

Peran penting sebagai penasihat di *multilateral development bank* paling bergengsi tersebut harus diampunya per-1 November 2016. Tak ada waktu baginya untuk mencerna semua perasaan yang bercampur

aduk. Saat menerima kabar tersebut, Ia tengah mengurus kesiapan delegasi Indonesia yang akan bertolak ke pertemuan tahunan di Washington D.C. Tanggung jawab tersebut menyita waktunya hingga pertengahan Oktober. Sampai akhirnya hanya 2 minggu tersisa bagi perempuan kelahiran Tegal ini untuk mempersiapkan keberangkatannya.

Keikhlasan Dian dalam menjalankan peran yang dipercayakan padanya diuji sesampainya di negeri Paman Sam. Dian dituntut harus langsung dapat beradaptasi. Sepekan awal, Ia harus fokus pada program pendampingan dengan *senior advisor* sebelumnya. "Kalau saya *missed* di sini, saya akan kehilangan kesempatan untuk dapat transisi yang *smooth*," ujarnya. Hal tersebut dirasa cukup menantang baginya, tapi Dian punya cara menghadapinya.

Kuncinya satu, jangan

dipikirin, tapi jalanin aja. Kalau ada yang dipikirin biasanya akan banyak kekhawatiran. Tapi kalau kita fokus untuk jalanin, kita *nggak* sempat mikir begitu," bebernya.

Kekuatan dukungan keluarga

Pengalaman bertugas di World Bank tak hanya menempa Dian dalam sisi profesionalitas berkarier, tetapi juga dalam perannya sebagai istri dan ibu dalam keluarga. Begitu menerima kabar penugasannya, ia langsung mengutarakan maksudnya untuk membawa serta dua buah hatinya yang beranjak dewasa. "Suami gak bisa ikut karena ada tanggung jawab pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Tapi kami sepakat bahwa anak-anak butuh *international exposure* dan ini saatnya!" ungkapny. Masa-masa awal kepindahannya di Amerika membuatnya berjibaku dengan beragam hal. Belum lagi menyesuaikan fisik di lingkungan baru, pekerjaan menuntutnya untuk cepat beradaptasi dengan ritme kerja yang jauh berbeda dengan di Indonesia. Sementara itu, Ia juga harus memilih lingkungan terbaik untuk mereka hidup saat kedua putrinya menyusul tiga bulan berikutnya.

"Saya memilih tinggal di Rockfiled, Maryland. Daerah *suburb* (pinggiran) yang punya sistem pendidikan oke dan jadi kawasan favorit komunitas internasional yang kerja di D.C buat tinggal bersama keluarga," ucapnya. Pilihan tersebut dianggap tepat. Meskipun isu ketegangan ras, agama, dan golongan merebak karena iklim





Dian Bersama Keluarga

Foto Dok. Pribadi

perpolitikan Amerika Serikat yang memanas, kawasan tempat tinggalnya tetap damai. "Di sana *tuh diverse* banget penduduknya. Jadi anak-anak bisa belajar lebih *respect* dan *tolerant* juga," serunya.

Sesekali suaminya datang mengunjungi Dian dan putri-putrinya. Tak jarang pula Dian harus kuat meninggalkan kedua putrinya mandiri di negeri orang saat dirinya harus dinas sejenak ke tanah air. Ia

bersyukur memiliki keluarga yang dapat memahami kesibukan masing-masing tanpa terlalu banyak tuntutan. Ia bersyukur kemudahan berkomunikasi kini juga makin dipermudah dengan kemajuan teknologi. "Ada kalanya mereka butuh perhatian dan kehadiran saya langsung. Tapi selebihnya saya selalu tanamkan pengertian bahwa di manapun saya berada, hati dan pikiran saya, doa saya dalam ibadah saya itu untuk mereka," ucapnya menahan haru.

Dalam membina keluarga, Dian sangat meneladani kedua orangtuanya. Bagi Dian, Bapak dan Ibunya mengajarkan sesuatu bukan dari tutur kata, tapi lebih kepada perbuatan. Terlebih dari sosok sang Ayah yang merupakan praktisi hukum dan dianggapnya sangat menunjukkan makna sebenarnya dari memegang teguh integritas. "Saya juga ingin seperti orang tua saya, yaitu saya memberikan contoh tanpa harus bicara secara verbal. Saya juga ingin anak-anak saya melihat apa yang saya lakukan untuk negara itu menginspirasi," sahutnya.

Asam garam pengalaman kini melabuhkan Dian Lestari pada posisi Kepala PKRB BKF. Sebuah peran baru yang membawa tantangan tak kalah seru. BKF baru saja mengalami reorganisasi besar-besaran. Komposisi pegawainya kini didominasi jabatan fungsional yang berisi analis-analis andal. Peran pejabat eselon dua kini menjadi pembina para analis yang memiliki beban pekerjaan khas individu yang berbeda-beda.

"Saya sering membuka sesi komunikasi dengan kelompok analis, dari yang senior, madya, sampai junior. Saya mau mendengarkan aspirasi. Dari komunikasi itu kan orang saling tahu ekspektasi masing-masing. Orang tahu ekspektasi saya terhadap mereka, dan sebaliknya, kemudian kita sama-sama bekerja berdasarkan pemahaman kita mengenai apa yang masing-masing ekspektasikan terhadap pimpinan dan organisasinya," jelasnya mendetail.

Dian percaya bahwa ketentuan dari sekretariat atau badan yang mengatur teknis pekerjaan dari para analis ini telah diramu dengan baik. Pekerjaan rumah yang harus ia selesaikan sebagai pembina adalah menjaga atau bahkan meningkatkan motivasi mereka. Ia harus mau menjadi pendengar yang baik sekaligus terus meyakinkan bahwa ini merupakan peluang tak terbatas bagi para analis untuk meniti karier di Kementerian Keuangan.

"Untuk menjaga motivasi, agar mereka tetap dengan spirit yang tidak tidak turun, tapi justru malah mereka ingin berbuat lebih dengan pendekatan yang baru yang diterapkan di sini, itu yang saya jaga. Makanya komunikasi itu buat saya sangat diperlukan untuk mereka bisa tetap semangat memberikan yang terbaik untuk organisasi," pungkasnya.

Buku



Judul:
No Exit

Penulis / Penerjemah:
Taylor Adams/Reni Indardini

Tahun Terbit:
2019

Dimensi:
370 Halaman

Kunjungi Perpustakaan
Kementerian Keuangan dan
Jejaring Sosial Kami:
Gedung Djuanda I Lantai 2
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta Pusat

**Buku Buku Pilihan
Perpustakaan Kemenkeu:**

- 1 Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif
Septian Santana
- 2 Memorizing Like an Elephant
Yudi Lesmana
- 3 50 Dongeng Negeri Timur
Dian K, Tethy Ezokanzo
- 4 Sherlock Holmes: Koleksi Kasus 2
Mitch Albom
- 5 Berani Tidak Populer
Budi S. Tanuwibowo

Kejutannya Sampai di Kalimat Terakhir

Peresensi Riza Almanfaluthi, pegawai DJP

Bagi Anda penonton film-film Hollywood tentunya sudah tak asing dengan tema cerita kengerian dan pembunuhan yang terjadi di losmen, SPBU, rumah kusam yang berada di jalanan terpencil, dan jauh dari mana-mana. Apalagi tokoh antagonis yang diusung biasanya adalah psikopat keji yang disandingkan dengan protagonis yang berjuang mempertahankan hidup matimatian.

Buku "No Exit" salah satunya. Pakemnya tidak berbeda, tetapi ujung cerita buku ini benar-benar menyulitkan pembacanya. Yang pasti karena Taylor Adams—sang penulis buku—menyuguhkan ketegangan dan kejutan sampai kalimat terakhir di epilog novelnya.

Visualisasi di benak masing-masing pembaca memang dibuat seperti film-film hitam Hollywood. Hitam bukan perihai warna kulit, melainkan waktu yang semuanya terjadi di malam hari dan film yang tak menyuguhkan keceriaan sampai akhir cerita.

Tokoh utama "No Exit" semacam gabungan antara tokoh Ellen Ripley dalam Alien dan Sarah Connor dalam The Terminator yang digambarkan pada sosok mahasiswi rapuh bernama Darby Thorne yang terjebak di sebuah tempat istirahat di daerah terpencil di malam Natal karena Snowmageddon, badai salju.

Semuanya bermula ketika Darby secara tidak sengaja melihat seorang gadis berumur tujuh tahun berada di

dalam kerangkeng anjing pada mobil van di tempat yang sama di mana ia memarkirkan Blue, mobil Honda Civic '94 Darby.

Salah satu dari empat orang di tempat istirahat itu adalah si pelaku penculikan. Darby harus berbagi oksigen dengan mereka dan tidak tahu siapa sang pelaku sampai ia benar-benar berhadapan dengan penjahat yang seperti tidak pernah bisa mati-mati dan penuh keberuntungan. Atau keberuntungan itu dapat disebut juga dengan kalimat: roti lapisnya lagi-lagi mendarat di bagian yang tidak diolesi selai.

Sebagai pembaca buku, kita sering menjumpai novelisasi sebuah film. Ekspektasinya adalah agar cerita tidak berjarak. Namun, seringkali pembaca buku berharap terlalu banyak pada filmisasi sebuah novel. Visualisasi di film seringkali jauh dari apa yang dibayangkan dan diharapkan dibanding ketika membaca bukunya. "No Exit" lagi-lagi berbeda. Buku ini sudah menjadi filmnya itu sendiri. Secara sederhana, pembaca begitu mudah untuk meletakkan dalam format film di benaknya saat membaca buku ini.

Wajar, karena Taylor Adams sendiri selain sebagai penulis adalah sutradara film pendek yang mendapat banyak pujian atas filmnya yang berjudul And I Feel Fine pada 2008. "No Exit" adalah novel ke-tiga Taylor Adams yang diterbitkan Jofee Books. Buku yang sudah diterbitkan dalam 30 bahasa ini layak menjadi teman perjalanan Anda.

PERAN ANGGARAN DAN KOORDINASI ANTARLEMBAGA DALAM Mitigasi Bencana

Teks Mahpud Sujai
Peneliti Madya, Badan Kebijakan Fiskal

Indonesia merupakan Negara yang berada di Kawasan Cincin Api Pasifik, rangkaian gunung api paling aktif di dunia yang membentang sepanjang lempeng pasifik. Posisi geografis tersebut membuat Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam terutama gempa bumi. Selain itu, bentuk negara yang berupa kepulauan membuat Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Indonesia juga memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang sangat tinggi yang bisa berakibat pada bencana tanah longsor di dataran tinggi dan bencana banjir di dataran rendah. Melihat kondisi Indonesia yang rawan bencana menjadikan program mitigasi bencana sangat penting dirancang pemerintah.

Dampak bencana di Indonesia

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang tahun 2019 telah terjadi sebanyak 3.721 bencana alam tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang berdampak pada 477 orang meninggal dunia, 109 orang hilang, 3.415 orang luka-luka dan 6,1 juta orang mengungsi dari tempat tinggalnya. Selain itu,

dampak bencana juga menimbulkan kerusakan pada 72.992 rumah, 2011 unit fasilitas umum dan fasilitas kesehatan, 270 kantor pemerintahan dan juga 437 jembatan.

Berdasarkan jenis bencana alam yang terjadi, sekitar 97 persen termasuk bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor dan 3 persen adalah bencana geologis seperti gempa bumi dan gunung meletus. Meskipun rendah dari sisi frekuensi, namun bencana geologis memiliki dampak yang sangat besar terutama jika terjadi tsunami dan gempa. Untuk itulah, diperlukan kesadaran ekstra dari seluruh lapisan masyarakat termasuk pemerintah dalam memitigasi bencana alam.

Urgensi program mitigasi bencana

Program mitigasi bencana bertujuan untuk mengurangi dampak kerusakan dan kehilangan korban jiwa akibat bencana. Memberikan edukasi kepada masyarakat merupakan salah satu aspek terpenting dalam program mitigasi bencana. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukan materi kebencanaan dalam kurikulum pendidikan. Mitigasi lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah menyiapkan berbagai peralatan

pendeteksi bencana, seperti alat pendeteksi banjir maupun tsunami. Dengan demikian, masyarakat dapat mengantisipasi datangnya bencana alam sehingga dampak kerugian baik jiwa maupun materi dapat diminimalisasi. Program mitigasi lain yang dilakukan pemerintah dengan meningkatkan akurasi informasi kebencanaan bagi masyarakat melalui BMKG dan BNPB.

Beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia juga disebabkan oleh kerusakan alam dan perubahan iklim seperti banjir dan kebakaran hutan. Program mitigasi bencana perlu disinkronkan dengan program mitigasi perubahan iklim seperti pengurangan kerusakan hutan, restorasi lahan gambut, reboisasi dan penghijauan daerah hulu sungai. Dengan mengarusutamakan mitigasi perubahan iklim, secara langsung akan dapat mengurangi risiko terjadinya bencana alam di Indonesia.

Dukungan anggaran

Pemerintah melalui APBN telah mengalokasikan dana penanggulangan bencana. Alokasi dana tersebut terbagi dalam tiga kategori. Pertama, dana kontijensi bencana disediakan dalam

Ilustrasi
Dimach Putra



APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap Prabencana. Kedua, dana siap pakai (DSP) yang disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada tahap keadaan darurat. DSP juga harus disiapkan oleh pemerintah daerah melalui APBD. DSP harus tersedia sesuai kebutuhan pada saat tanggap darurat. Ketiga, dana bantuan sosial berpola hibah yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahap Pascabencana.

Sepanjang 2019, pemerintah telah mengeluarkan dana lebih dari Rp15 triliun yang berasal dari APBN untuk penanganan bencana baik melalui alokasi anggaran kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun alokasi anggaran lainnya. Pemerintah juga menyediakan dana yang lebih besar untuk penanganan serta mitigasi kebencanaan yang disimpan dalam bentuk DSP yang berada dalam alokasi Bendahara Umum

Negara (BUN).

Dana khusus untuk bencana alam tersebut termasuk anggaran yang disisihkan pemerintah pusat pada APBN setiap tahunnya. Apabila tidak ada bencana alam dalam skala tertentu, maka dana tersebut akan terus terakumulasi setiap tahunnya. Dana khusus bencana alam ini berbeda dengan dana darurat kebencanaan yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan kegiatan penanganan bencana alam.

Penanggulangan bencana harus dilakukan secara tepat namun tetap memperhatikan tertib administrasi dan akuntabilitas. Terkait dengan hal ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 mengenai pendanaan dan

pengelolaan dana penanggulangan bencana.

Pemerintah juga komprehensif mendukung penanganan bencana secara tepat waktu dan kualitas dengan tetap akuntabel. Akuntabilitas pembiayaan untuk penanganan bencana sangat penting untuk menghindari potensi penyalahgunaan anggaran yang mungkin timbul akibat dana yang harus keluar dengan cepat untuk keperluan penanganan bencana. Hal ini juga sebagai bentuk transparansi anggaran yang dialokasikan dan tanggung jawab kepada masyarakat.

*Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan/perspektif institusi tempat penulis bekerja.

Tol Dumai Ekonomi Damai

Foto dan Teks Resha Aditya P

Tol Pekanbaru - Dumai merupakan bagian dari jalan tol trans Sumatra yang menghubungkan Pekanbaru dengan Dumai yang berada di Provinsi Riau. Pembangunan jalan tol yang dimulai pada bulan Desember 2016 ini, dibagi menjadi 6 seksi dengan total panjang keseluruhan sebesar 131,48 km dan akan dioperasikan secara penuh pada April 2020. Proyek ini merupakan proyek strategis nasional (PSN) dengan menggunakan anggaran APBN sebesar Rp16,21 triliun. Uniknya, jalan ini bisa dilalui oleh gajah yang hidup di hutan sekitar tol melalui terowongan khusus gajah terletak di seksi 4 dan 5. Tol Pekanbaru - Dumai akan memangkas waktu tempuh dari 5-6 jam menjadi 1-2 jam dan diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah pekanbaru sebagai kota bisnis dan dumai sebagai kota pelabuhan dengan industri peminyakan yang maju dan agrabisnis. Selain itu, tol ini akan teintegrasi dengan konektivitas kawasan dan memperlancar arus distribusi barang dari pusat industri ke berbagai wilayah di wilayah Sumatera.

Total Panjang

131,48Km

APBN

Rp16,21 T

Jarak Tempuh

1-2 Jam



Seksi Jalan Tol
Pekanbaru - Dumai

Pekanbaru

Minas

Petapahan

Kandis Utara

Duri Selatan

Duri Utara

Dumai

MENJADI CALON SOSIALITA,

Memakmurkan Indonesia

Teks Bramantya Saputro

Pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI



Indonesia baru-baru ini telah menjadi negara ekonomi kelas menengah, dengan jumlah populasi kelas menengahnya mencapai 16 persen pada tahun 2014 dari hanya 5 persen pada tahun 1993 (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Indonesia juga berhasil menjadi salah satu negara dengan pengentasan kemiskinan tercepat di dunia. Namun demikian, sekitar 26 juta orang Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan dan 77,4 juta orang atau setara dengan 29,1 persen dari populasi masih menjadi bagian kemiskinan atau rentan jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Hal ini menunjukkan tingginya jumlah penduduk Indonesia yang masih rentan terhadap guncangan ekonomi walaupun ada kemajuan yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, penting untuk menemukan solusi yang efektif guna mengubah masyarakat miskin Indonesia menjadi masyarakat berpenghasilan menengah. Rumah tangga berpendapatan menengah merupakan kontributor konsumsi dan sumber suara sosial serta politik yang signifikan dalam membentuk kebijakan pembangunan.

Solusi yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia, antara lain dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan terutama dalam penyediaan keterampilan khusus yang dibutuhkan oleh lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas kesehatan dan peluang kehidupan bagi anak-anak di daerah pedesaan. Semua hal tersebut membutuhkan sejumlah besar pembiayaan di tengah tekanan global, rasio pajak yang rendah, dan rencana pemerintah untuk mengurangi pajak penghasilan.

Langkah awal yang dapat dilakukan yakni dengan memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak. Apabila jumlah “calon kelas menengah” dan “kelas menengah” dapat meningkat secara proporsional, maka dengan basis subjek pajak yang substansial itu, Indonesia dapat menerapkan rezim pajak penghasilan progresif, di mana mereka yang memiliki pendapatan berlebih harus membayar lebih banyak pajak. Dengan terhimpunnya dana pajak tersebut, Indonesia kemudian dapat membangun skema perlindungan sosial yang kuat. Tantangan berikutnya adalah bagaimana membuat pembelanjaan kelas menengah agar menjadi lebih produktif, karena jika pengeluaran kelas menengah tersebut tidak produktif, maka risiko jatuh ke dalam *middle income trap* akan lebih besar.

Dari segi ketenagakerjaan dan produktivitas tenaga kerja, terlepas dari upah yang kecil, produktivitas yang rendah telah menghasilkan total biaya *output* yang lebih tinggi. Di samping

itu, pada tataran global, Indonesia masih berada di peringkat ke-2 terkait kekakuan kontrak kerja terutama dalam hal pemutusan hubungan kerja, sedangkan tingkat kepatuhannya hanya sebesar 49 persen. Pengangguran usia muda mencapai tujuh kali lebih banyak dari pengangguran orang dewasa, sementara sebanyak dua dari tiga perempuan Indonesia termasuk di antara mereka yang menganggur. Di lain sisi, sehubungan dengan tingkat pelatihan, hanya sekitar 8 persen dari perusahaan yang ada di Indonesia yang benar-benar memberikan pelatihan untuk karyawan mereka, padahal pemerintah telah memberikan insentif pajak berupa pengurangan hingga Rp300 juta (*super deduction*) bagi perusahaan yang memberikan pelatihan bagi karyawannya.

Dari segi pembangunan pendidikan, meskipun telah ada upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan mendasar, namun *outcome* dari upaya ini masih belum optimal. Pencapaian rata-rata pengetahuan siswa dengan lama pendidikan 12 tahun sebenarnya hanya sama dengan 7,9 tahun mengenyam pendidikan. Hal ini menunjukkan ketidakefektifan dalam proses pembelajaran, baik dari sisi kurikulum dan kapasitas guru, dan/atau terbatasnya fasilitas pendidikan yang ada. Beberapa ide muncul sebagai solusi dari tantangan dimaksud, salah satunya dengan mengembangkan dan memperluas industri pendidikan anak usia dini. Hal ini dianggap mendesak karena sebuah penelitian menunjukkan bahwa *return* pendidikan satu tahun pada anak usia dini lebih besar daripada *return* pendidikan pada perguruan

tinggi dengan durasi yang sama. Sayangnya, hanya sekitar 1 persen anak Indonesia yang saat ini dapat menikmati pendidikan anak usia dini.

Dari segi kualitas kesehatan, 27 persen anak Indonesia masih mengalami hambatan pertumbuhan (*stunting*) sehingga Indonesia berada pada peringkat *stunting* ke-5 di dunia. Sementara itu, dari 74 persen wanita Indonesia yang telah mendapat pemeriksaan kehamilan, hanya 37 persen yang mampu memberikan ASI dan hanya 58 persen yang telah menerima suntikan imunisasi untuk bayinya. Oleh sebab itu, efektivitas sistem perlindungan kesehatan nasional harus ditingkatkan, antara lain melalui pembetulan alokasi subsidi, mengingat saat ini sebanyak 40% rumah tangga kelas menengah masih menerima subsidi pemerintah, dan peningkatan kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial kesehatan.

Pada akhirnya, meskipun kombinasi dari tantangan pembangunan, demokrasi, dan desentralisasi cenderung memperumit masalah dan penanganannya, namun pemerintah harus mampu merancang kebijakan yang tidak hanya layak berdasarkan standar yang diterima, tetapi juga sesuai untuk Indonesia yang kaya akan keberagaman. Pemerintah harus dapat mengimplementasikan kebijakan yang memastikan keberlanjutan dan produktivitas pembiayaan pembangunan, meskipun setiap kebijakan yang diambil tidak akan bisa menyenangkan semua pihak.

*Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan/perspektif institusi tempat penulis bekerja.

Lestari Berkat Difusi Inovasi

Teks CS. Purwowidhu

Merengkuh teknologi dalam mengembangkan kebudayaan merupakan keniscayaan di era industri 4.0 ini, manfaatnya bukan hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi mendatang. Adalah sekelompok peneliti di Laguboti, pinggir Danau Toba, yang terdiri dari informatikawan, programmer, desainer, pengembang bisnis, dan pengembang komunitas dari Institut Teknologi DEL (IT DEL), yang diketuai oleh Dr. Arlinta Christy Barus, berupaya menyelaraskan budaya dengan kemajuan teknologi agar warisan leluhur tetap terjaga. Kolaborasi multidisiplin peneliti di IT DEL bersama maestro tenun nusantara dari ITB, serta sinergi dengan Pikel Indonesia mereka jalankan dalam menciptakan inovasi tenun nusantara.

Indonesia memiliki kain tenun yang beragam, seperti Songket Palembang,

Ulos Batak, Troso Jepara, Grinsing Bali, tenun Toraja, tenun NTT, dan sebagainya. Warisan budaya yang lahir dari keterampilan antargenerasi ini telah bertahan selama ratusan tahun. Namun sangat disayangkan, di luar pulau Jawa, industri kerajinan tenun tersebut semakin sedikit jumlahnya karena upaya pengembangan industrinya yang masih belum optimal. “Inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk mengolah dan mengembangkan industri tenun nusantara masih minim,” ujar Arlinta. “Padahal begitu banyak potensi ekonomi yang bisa dikembangkan dengan tenun,” sambungnya.

Arlinta berpendapat, pengembangan desain motif tenun yang modern dan populer menjadi salah satu kunci ekstensifikasi pemakaian tenun sehingga tenun tidak terbatas pada seremonial adat saja, tapi juga dapat beradaptasi dengan tren yang sedang

berkembang di masyarakat. Dengan begitu pemasarannya pun dapat meningkat. *Software* DiTenun hadir menjawab permasalahan tersebut dengan solusi inovatif bagi penenun dalam mempermudah proses desain motif tenun baru.

Digital tenun

DiTenun (berasal dari kata Digital Tenun) lahir sebagai hasil inovasi yang tumbuh menjadi platform dan aplikasi yang menyediakan fitur pembuatan variasi motif tenun secara otomatis dan berbagai pengelolaan motif digital, seperti lembar kerja kristik digital, editor motif, dan editor kristik. Sentuhan teknologi ini tidak hanya dapat diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan penenun, tetapi juga mendorong minat generasi muda untuk bertenun dengan kemudahan yang ditawarkan. “DiTenun punya fitur kristik yang dapat mengubah motif baru ke dalam tampilan kristik, jadi lebih gampang untuk menenun motif baru,” ungkap Arlinta. Arlinta berharap, ke depan DiTenun juga memiliki fitur tambahan sebagai platform untuk mempromosikan dan mengkomersialisasikan produk tenun nusantara.

Arlinta memaparkan DiTenun sangat prospektif untuk memajukan industri tenun tradisional. Karya yang telah mendapatkan hak cipta ini menyediakan sebuah sistem pengumpul data tenun di Indonesia yang sangat dibutuhkan untuk membentuk basis



Dr. Arlinta Christy Barus

Foto Dok. Pribadi

data umum tenun nusantara. “Basis data ini sangat penting karena dapat merekam jejak sejarah kreativitas desain tenun nusantara dan mendukung upaya pelestariannya,” terangnya.

Difusi inovasi

Sejak peluncurannya pada akhir 2018 silam, aplikasi dan website DiTenun sudah berjalan lebih dari setahun. Mengawali debutnya, kain Ulos dipilih sebagai jenis tenun yang menjadi *pilot project* mengingat lokasi IT DEL yang berada di dataran tinggi Toba. Tim yang digawangi Arlinta terus bersemangat memajukan pemberdayaan kain tenun nusantara meskipun tidak sedikit pula kendala yang dihadapi. Arlinta mengungkapkan faktor usia penenun yang mayoritas berusia lanjut menjadi kendala dalam menggunakan aplikasi DiTenun. Di samping itu, keterbatasan jumlah penenun membuat mereka tidak memiliki cukup waktu untuk menjadi mitra binaan DiTenun. “Saat ini penenun sudah sibuk dalam mengerjakan tenunan dengan motif yang sudah ada yang diminta oleh pasar sehingga penenun tidak mempunyai waktu untuk menjadi mitra binaan,” ujarnya.

Tidak menyerah dengan tantangan yang ada, berbagai strategi pun

dilancarkan agar komersialisasi DiTenun berkesinambungan. Arlinta dan tim membuat sentra DiTenun yang memiliki staf/operator aplikasi DiTenun untuk membantu penenun menghasilkan motif baru, lalu mencetak motif (dalam bentuk kertas) untuk dibawa pulang oleh penenun sebagai lembar kerja dalam bertenun. Perekrutan calon penenun muda untuk dilatih bertenun juga digencarkan, “Kami harap anak-anak muda lebih tertarik bertenun dengan adanya DiTenun supaya ada regenerasi penenun juga,” harapnya. Aplikasi DiTenun juga akan ditargetkan digunakan oleh desainer fesyen dan juga pembeli produk turunan dalam mendesain kain tenun yang mereka butuhkan. Lalu hasil desain akan diberikan kepada penenun untuk dijadikan kain tenun yang diharapkan.

Pelatihan dan pembinaan penenun Ulos dalam menggunakan piranti DiTenun pun dilakukan di tiga kabupaten di Sumatera Utara, yaitu Tobasa, Humbanghas, dan Simalungun, dengan total peserta pelatihan hingga saat ini sebanyak 40 orang. “Kami bermitra dengan pemda dan industri untuk mendapatkan bantuan dana untuk melatih dan membina penenun,” ungkap Arlinta. Skema bermitra ini dipilih

mengingat penenun belum mampu mendanai kegiatan pengembangan dirinya secara mandiri. Agar perajin dapat melihat hasil nyata dari aplikasi dan pelatihan yang sudah dijalankan, produk turunan dari aplikasi DiTenun kemudian diproduksi dan dipasarkan. “Kita memproduksi kain Ulos dan produk fesyen lainnya yang ditenun dengan menggunakan motif hasil dari aplikasi DiTenun,” tuturnya.

Rural area bukan masalah

Mengulas balik perjuangan lima tahun ke belakang ketika pertama kali mengajukan pendanaan riset untuk pembangunan aplikasi, Arlinta dan tim merasa sangat bersyukur DiTenun dapat lahir dan bertumbuh seperti sekarang ini. Multidisiplin ilmu yang berpadu dengan solid menjadi kekuatan tersendiri dalam riset ini. Niat tulus IT DEL dan mitra Pikel Indonesia untuk memperkuat industri tenun nusantara dan meningkatkan kesejahteraan penenun Indonesia dapat terwujud berkat bantuan pendanaan penelitian skema *Riset Inovatif Produksi Komersial* (Rispro Komersial) LPDP. Bukanlah hal mudah untuk IT Del sebagai perguruan tinggi yang relatif baru dan kecil, yang berlokasi di rural area, harus bersaing dengan banyak perguruan tinggi besar dan ternama dalam seleksi Rispro Komersial LPDP. “Kami bersyukur, setelah melewati seleksi ketat, tim kami saat itu dipercaya untuk dapat menerima pendanaan Rispro Komersial LPDP yang sangat bergengsi ini, untuk jangka waktu tiga tahun penelitian,” ucapnya.

Arlinta mendorong para peneliti memanfaatkan dana riset LPDP untuk merealisasikan ide-ide kreatif dan inovatif yang dimiliki. Peneliti juga perlu mempersiapkan proposal dengan baik. “Adanya pendampingan mitra yang siap membantu pemasaran produk penelitian juga merupakan salah satu faktor utama untuk keberhasilan proposal,” tambahnya.



Gedung Danadyaksa Cikini
Jl. Cikini Raya no. 91 A-D Menteng
Telp/Faks. (021) 3846474
E-mail. lpd@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

TELAGA SARANGAN

SURGA WISATA BELANJA

Teks dan Foto Yogi Bayu Avian

Belanja adalah salah satu kegiatan melepas penat yang mengasyikkan. Di luar konteks pemanjaan naluri konsumtif, kegiatan jual beli ini nyata-nyata dapat memberi dampak psikologi yang positif. Saat berbelanja di pasar tradisional, keberhasilan seseorang dalam menawar barang adalah kenikmatan tersendiri yang seringkali bisa dibanggakan dalam obrolan-obrolan santai.

Destinasi wisata Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan memberikan pilihan wisata berbelanja unik. Di sini banyak ditemui pedagang-pedagang buah dan sayuran segar yang menjual dagangannya dengan harga murah. Warna-warni sayur dan buah memanjakan mata ketika memasuki area pasar yang hiruk pikuk dengan aktivitas belanja. Tingkat elevasi yang mencapai 1200 mdpl membuat banyak jenis buah dan sayuran khas dataran tinggi dapat tumbuh subur.



Warna oranye dari varietas jeruk baby yang sedang dalam musim panen, mendominasi etalase para pedagang. Dalam masa panen ini, komoditas jeruk baby yang manis dan disukai balita menjadi serbuan pengunjung. Harga yang ditawarkan berkisar antara Rp7.000 hingga Rp10.000 per kilogram.

Sedangkan sayuran seperti lobak, kubis, tomat, labu dan selada memang selalu tersedia untuk dijual di pasar Sarangan.

Telaga Sarangan terbentuk secara alami dari aktivitas vulkanis Gunung Lawu. Luas telaga yang terbentuk kurang lebih sekitar 30Ha. Dengan banyak fasilitas yang telah dibangun di area wisata ini, Sarangan dapat memperoleh kunjungan 5.000 orang per hari. Tiket masuk yang dikenakan sebesar Rp20.000 per orang dewasa.

Selain wisata belanja sembari berjalan-jalan di tepi telaga, wisatawan juga dapat keliling telaga menggunakan boat atau kuda. Kedua atraksi wisata itu dibanderol dengan harga Rp60.000. Mudah-mudahan, tarif boat dan kuda ini tertera jelas dan resmi tanpa harus melalui proses tawar menawar. Tarif yang tertera jelas juga terdapat pada permainan lain seperti odong-odong, mobil-mobilan aki, segway, dengan tarif Rp3.000 hingga Rp10.000 dengan durasi sepuasnya.

Bagi penggemar wisata kuliner, Sate Kelinci khas Sarangan adalah salah satu yang paling laku. Menikmati daging kelinci yang lembut dan gurih dibalur saus kacang yang manis pedas di warung-warung tenda terbuka di tepi telaga adalah opsi *retreat* murah yang menyenangkan sekaligus mengenyangkan.

Sebelum pulang, masih ada satu jenis wisata belanja lain yang tidak mungkin dilewatkan wisatawan, khususnya ibu-ibu. Barisan toko-toko baju yang mayoritas menyediakan daster, batik, kaos dan macam pakaian tentu mengharapkan anda untuk datang. Jangan tanya soal harga, karena hal itu tergantung pada kemampuan seni bernegosiasi anda.

Artikel dalam rubrik ini terbuka untuk umum. Kirimkan naskahmu ke alamat email mediakeuangan@kemenkeu.go.id sertakan nama, alamat, dan no telepon.

Dana Darurat Saat Pandemi

Perekonomian global di awal tahun 2020 sedikit mendapat sentimen positif yang ditandai dengan adanya perjanjian damai dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dimana kedua belah pihak sepakat untuk saling memehuni kontrak dagang pada periode pertama ini. Berdekatan dengan berita tersebut, perekonomian dunia kembali diterpa ketidakpastian yang datang dari isu geopolitik antara Amerika Serikat dan Irak. Isu ini lebih mengarah pada harga komoditas minyak yang dikhawatirkan akan terus mengalami kenaikan karena potensi perang antara kedua negara yang dapat mengganggu suplai minyak dunia. Tidak berhenti disitu, *headline* berita di seluruh dunia dipenuhi pemberitaan kasus virus Corona yang menimpa Tiongkok yang semakin parah di sekitar bulan Januari 2020 dan masih berlangsung hingga hari ini.

Pada Maret 2020, virus Corona ditetapkan sebagai pandemi dimana berdasarkan pengertian WHO dikaitkan dengan sebuah virus baru yang dengan

cepat menyebar ke beberapa benua. Faktanya, kebanyakan orang tidak kebal terhadap virus ini sehingga pandemi ini menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu dan menimbulkan korban jiwa secara terus menerus. Pandemi terakhir terjadi di 2009 yang dikenal dengan *Swine Flu* dengan total korban jiwa sebesar 575.000.

Analisis dari beberapa lembaga riset memproyeksikan bahwa ekonomi di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang akan mengalami resesi. Seharusnya dapat dipahami secara mendasar, ketika ekonomi dunia atau suatu negara sudah mencapai kapasitas ekspansi maksimum, hal ini pasti akan diikuti dengan fenomena perlambatan ekonomi yang berujung pada resesi. Pandemi ini tentunya dapat menjadi pemicu terjadinya gejolak di dunia maupun Indonesia karena berpotensi menciptakan *economic shocks*.

Lalu bagaimana dengan Indonesia yang sudah mengeluarkan berita resmi terkait kasus positif virus Corona dan jumlah korban jiwanya? Apa yang dapat kita lakukan di kondisi seperti ini?

Tentunya dengan level ketidakpastian yang semakin tinggi, dana darurat menjadi hal yang paling utama dan mendasar untuk dipersiapkan. Investasi dalam bentuk surat utang negara menjadi pilihan yang lebih aman ketika kondisi ini. Namun, investasi di aset portofolio seperti saham juga dapat menjadi peluang yang sangat baik karena banyak saham-saham berfundamental baik sudah mengalami koreksi harga yang cukup dalam. Lakukan evaluasi kembali terkait komposisi aset dan arus kas Anda.

Bagi kelas menengah, Anda dapat membantu mengangkat perekonomian Indonesia melalui aktivitas konsumsi. Konsumsi Anda sangat membantu pergerakan ekonomi di sektor UMKM dan keberlangsungannya. Kalangan konglomerat dapat saling berkompromi untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan pekerjaan dimana banyak sekali peluang yang dapat dimanfaatkan untuk tetap memberikan manfaat guna menjaga kelangsungan perekonomian Indonesia. Mari kita wujudkan hidup sehat dari sisi jasmani dan sehat secara finansial di tengah pandemik virus Corona ini.

Mas Praim

“Kenali Gejala, Jangan Panik”

Cerita : Farida Rosadi

Gambar : Ditto Novenska



MEDIAKEUANGAN



HARI KESEHATAN SEDUNIA
7 APRIL 2020

Foto
Feri Irwandy